

RESOLUSI KONFLIK AGAMA DI PULAU AMBON

Toni Setia Boedi H.*)

Adat Pela Gandong ternyata belum mampu mempertahankan keharmonisan. Permusuhan antara umat Islam dan Kristen sebenarnya sering terjadi pada masa-masa lalu. Pada tahun 1564, penduduk muslim mengepung dan membakar kampung-kampung Kristen; Nusanewe, kampung Leitimor dihancurkan. Panglima Portugis yang baru, Pareira Maraque, dengan kekuatan besar, mengepung pasukan Muslim Jawa dan Hitu di Teluk Ambon. Portugis menang dan rakyat Muslim dihukum berat (Marassabesy, 2001: 13). Tradisi telah luntur secara drastis pada saat terjadi konflik antar agama yang diawali pada peristiwa tanggal 19 Januari 1999 di mana masyarakat Islam yang sedang melaksanakan sholat idul fitri diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal, dan dieksploitir kemudian dieksploitir dengan mengidentitaskan diri sebagai kelompok Nasrani. Penelitian tentang proses terjadinya konflik antar agama Islam dan Kristen di kota Ambon sangat menarik (interest) sekali untuk dicermati karena dapat dijadikan pelajaran di kemudian hari konflik yang akan terjadi secara dini dapat segera terdeteksi dan mendapat penyelesaian secara cepat.

Situasi yang terjadi pada saat konflik sangat berbeda dengan situasi pada pasca konflik. Hal ini disadari akan berdampak pada kebebasan para peneliti untuk mencari data dan ketepatan (*accuracy*) data yang diperoleh. Kesadaran masyarakat untuk memberikan data masukan lebih besar dibandingkan pada

saat konflik berlangsung karena adanya tekanan situasi yang membuat seseorang takut memberikan informasi secara jujur. Salah satu contoh apabila seseorang ditanya tentang situasi atau pendapat tentang kelompoknya maka ia pasti akan menutup hal-hal yang jelek atau kurang dari kelompoknya demi

*) Alumni S2 Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM.

harga diri dan kesetiakawanan atau solidaritas kelompok.

Konflik antar agama selalu berdampak pada aspek lain karena masyarakat dalam melaksanakan kegiatan akan terkotak-kotak dalam kelompok besar sesuai dengan agama yang dianut. Pembangunan dan keamanan tidak dapat dipisahkan fokus perhatiannya karena dalam rangka melaksanakan pembangunan sangat diperlukan situasi yang aman. Oleh karenanya proses terjadinya konflik antar agama perlu diteliti secara cermat dan difahami sehingga dapat dijadikan bahan dalam mengendalikan situasi.

Dalam kehidupan masyarakat konflik tidak mungkin sama sekali dapat dihilangkan karena konflik bersifat inheren dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam memelihara ketertiban hanya dapat dilakukan melalui pengelolaan konflik atau dikenal dengan manajemen konflik. Konflik akan terjadi karena adanya sumber penyebab konflik. Pada dasarnya konflik terdiri dari konflik laten (*latent conflict*) dan konflik terbuka (*manifest conflict*). Konflik laten akan berubah menjadi konflik terbuka apabila ada faktor pendorongnya dan sekelompok atau seluruh pihak terlibat dalam konflik dan biasanya sering diwarnai dengan tindakan kekerasan. Pemicu konflik

dapat datang secara kebetulan saja atau memang dibuat atau diciptakan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan satu pihak. Apabila dirasa sangat menguntungkan dengan adanya konflik maka pihak yang menciptakan akan berusaha memelihara kelangsungan konflik. Penyelesaian konflik dapat diwujudkan melalui kesepakatan antar pihak yang sedang konflik dan tidak dapat dipaksa. Kesepakatan dengan pendekatan kepentingan yang sama akan meredakan situasi konflik secara bertahap.

Masyarakat Maluku, khususnya di Pulau Ambon yang mempunyai ikatan marga yang kuat telah membentuk suatu komunitas yang mengedepankan peran tokoh adat sebagai pemimpin non formal. Adat *pela gandong* yang menggambarkan kerukunan hidup bermasyarakat telah mengakar pada tata kehidupan masyarakat. Pecahnya konflik agama yang melibatkan sesama masyarakat Maluku merupakan penyimpangan karena terjadi dalam satu keturunan. Konflik fisik yang terjadi secara cepat antara umat Islam dan Kristen tanpa diawali proses panjang atau tahapan yang jelas telah menyimpang dari teori perkembangan eskalasi dari aman menuju rawan. Aspek lain yang memicu terjadinya konflik tidak

dapat dihindari perannya. *Pelagandong* yang telah ada pada masyarakat tidak menjamin terwujudnya kerukunan hidup masyarakat. Rasa cemburu atas keberhasilan merupakan faktor dominan yang mudah disulut untuk membentuk opini permusuhan. Masyarakat yang labil pada akhirnya sangat mudah terkena provokasi, apalagi dengan janji-janji yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.

Dampak dari krisis moneter yang diawali pada tahun 1998 berakibat pada lapangan kerja yang tersedia menjadi semakin terbatas dan angka pengangguran semakin meningkat serta semakin memperparah kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Kerawanan yang ada dan dapat menyebabkan konflik di Pulau Ambon adalah kesenjangan antara pendatang dan masyarakat pribumi serta temperamen masyarakat. Rasa nasionalisme sekelompok masyarakat semakin menurun akibat kepentingan-kepentingan yang tidak terakomodasi. Pemahaman ideologi Pancasila yang kurang mengakar sangat berpotensi memicu konflik yang terjadi dalam masyarakat. Menurut penelitian, nasionalisme dibentuk atau dibangun oleh aksi dan reaksi sosial (Suryo, 11) sehingga pada kondisi yang tidak kondusif, na-

sionalisme tidak akan terbentuk secara mantap sehingga keberadaan RMS merupakan salah satu pemicu yang dapat memperkeruh situasi dalam konflik.

Konflik yang terjadi di Pulau Ambon berlangsung dengan melibatkan beberapa kekuatan atau kelompok yang saling berorientasi pada pencapaian kepentingan kelompoknya. Beberapa kekuatan yang ada dapat kita inventarisir sebagai berikut: kekuatan preman, agama, pemuda, tokoh adat, pengusaha, partai, RMS, birokrasi, TNI, Polri, media massa, LSM, Laskar Kristus dan Laskar Jihad. Setelah terjadi perpecahan yang signifikan, akhirnya disadari bahwa situasi yang tidak aman sangat mengancam jiwa dan harta benda sehingga perlu diakhiri. Keterlibatan para aktor dalam pembahasan ini lebih diarahkan kepada para pimpinan atau tokoh masing-masing kelompok yang mempunyai kewenangan sebagai pemimpin atau tokoh yang mempunyai kekuasaan untuk memimpin, mengendalikan atau mengajak kelompoknya untuk melakukan sesuatu karena fungsi maupun kewenangannya. Peran dan tanggung jawab para pejabat ataupun para tokoh sangat menentukan dalam perkembangan situasi.

Penciptaan kondisi diawali pada tanggal 14 Desember 1998,

dimana terlihat kerumunan preman Ambon yang akan pergi ke Ambon dengan menggunakan kapal laut. Diduga ada beberapa provokator yang memanfaatkan situasi ini untuk melaksanakan misinya. Sekelompok pemuda dari Belanda mendanai kepulangan preman Ambon dengan biaya Rp1.000.000,- per orang untuk pergi ke Ambon, dan tiket sudah ada yang membayar. Langkah awal yang dilaksanakan oleh para preman untuk membakar situasi yaitu dengan menghembuskan himbauan yang bersifat membakar massa. Pada 19 Januari 1999, di kala umat muslim melaksanakan sholat idul fitri, terjadi penyerangan secara mendadak oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Kejadian menjadi cepat berkembang dengan adanya isu antar agama. Kelompok penyerang dikonotasikan sebagai kelompok Kristen dan yang diserang adalah kelompok Islam.

Pada gilirannya, konflik melibatkan semua elemen masyarakat di Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung. Konflik agama juga merambah ke semua instansi yang ada di Pulau Ambon, sehingga dalam satu instansi dapat terbelah menjadi dua kubu. Semua elemen yang terlibat konflik memiliki kepentingan masing-masing. Untuk mengatasi persoalan yang dihadapi,

keterlibatan.

Solusi penyelesaian konflik yang dilaksanakan di Kota Ambon secara umum telah di-agendakan dalam penyelesaian konflik nasional dan telah dirumuskan dalam rencana kerja pemerintah dengan pendekatan pemahaman Ideologi Pancasila serta pendekatan kemanusiaan dan budaya. Pengerahan satuan aparat keamanan dilaksanakan oleh satuan organik Kodam XVI/Pattimura pada saat mengatasi tindakan represif tahap awal, sedangkan satuan-satuan TNI dan aparat kepolisian dikerahkan untuk meleraikan pertikaian masyarakat. Pada saat awal, pengerahan satuan TNI dan Polri sebatas satuan yang ada di wilayah Ambon saja, seperti Batalyon Linud 733/ Masariku yang bermarkas di Benteng Victoria dan Poka dan Denzipur 5 yang berada di Poka Rumah Tiga. Langkah-langkah yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat atau kelompok yang bertikai dilaksanakan dengan cara mempertemukan kedua tokoh yang bertikai (kesepakatan Malino II yang dikoordinir oleh Menko Kesra Yusuf Kalla). Kesepakatan Malino II dilaksanakan di Ujung Pandang/ Makassar karena berdasarkan historis kesepakatan Malino I dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan atau meredakan konflik di

Posso.

Bantuan TNI dan Polri dilaksanakan dengan mengerahkan satuan organik, satuan penguasaan, tim khusus 19 orang TNI Polri putra daerah dan Koopslihkam.

Dalam melaksanakan tugasnya, Koopslihkam membagi menjadi 3 tahap dengan sasaran yang dirumuskan sebagai berikut. Tahap pertama selama 2 bulan menciptakan situasi dan kondisi keamanan yang mantap dan stabil. Tahap kedua selama 2 bulan, mengendalikan situasi secara tepat dan waspada; dan Tahap ketiga selama 1 bulan, memantapkan situasi dan kondisi yang terbentuk serta mengambil tindakan tegas terhadap setiap kesalahan atau penyimpangan yang terjadi, mengoptimalkan pencapaian sasaran dengan upaya mendukung serta mempercepat pelaksanaan tugas.

Masyarakat dituntut untuk tidak terpancing provokasi dan melaporkan kepada aparat keamanan apabila ada orang tidak dikenal yang masuk ke dalam wilayahnya. Deteksi dini juga merupakan tanggung jawab masyarakat sebagai langkah antisipasi. Dalam rangka memperlancar kegiatan yang menunjang kehidupan bermasyarakat *zona netral* (Asrama Yonif 733 di Benteng, Lanal di Halong, dll.) digunakan oleh masyarakat dalam

melaksanakan pertemuan yang berkaitan dengan tugas masing-masing kelompok. Pegawai bank dari BCA yang berada di daerah Nasrani berinteraksi dengan pegawai dari bank yang berlokasi di komunitas Muslim.

Kesepakatan Malino II di Makassar dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Februari 2002. Hasil kesepakatan merupakan payung hukum yang digunakan oleh TNI dan Polri dalam rangka melaksanakan tugas karena telah disepakati oleh kedua kubu yang sedang berkonflik. Sebelas kesepakatan yang dihasilkan dalam Malino II adalah: (1) Mengakhiri semua bentuk konflik dan kekerasan; (2) Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak memihak dan dengan dukungan seluruh masyarakat, karena itu aparat penegak hukum harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas (3) Menolak, menentang dan menindak segala bentuk gerakan separatisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI. (4) Sebagai bagian dari NKRI, maka masyarakat Maluku berhak untuk berada, bekerja dan berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia, begitu pula sebaliknya. (5) Segala bentuk organisasi, satuan, kelompok atau laskar yang bersenjata tanpa ijin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilu-

cuti atau diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku wajib meninggalkan Maluku. (6) Membentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, FKM, RMS, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, pengalihan agama secara paksa dan pelanggaran HAM dan lain-lain sebagainya demi tegaknya hukum. (7) Mengembalikan pengungsi ke tempat semula tanpa paksaan dengan segala hak-hak keperdaannya secara bertahap sesuai situasi dan kondisi. (8) Pemerintah akan membantu masyarakat untuk merehabilitasi mental, sosial, sarana ekonomi dan sarana umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat, agar masa depan seluruh masyarakat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan gerak penduduk dibuka, sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik. (9) Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat, kekompakan dan ketegasan TNI/Polri harus dibangun, dilengkapi dan difungsikan kembali. (10) Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi antar seluruh masyarakat pemeluk agama di

Maluku, maka segala upaya dan usaha dakwah dan penyiaran agama harus tetap menjunjung tinggi kemajemukan dan mengindahkannya budaya setempat. (11) Mendukung rehabilitasi Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama; karena itu, sistem rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan menggunakan prinsip keadilan dengan tetap memenuhi syarat kualitas yang ditentukan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada akhirnya menyebabkan masyarakat terintegrasi dalam tatanan yang sangat luas dan merubah sifat masyarakat lokal menjadi global (Featherstone, 1991; Miller, 1995; Strathern, 1995). Pandangan dan pendapat inilah yang digunakan sebagai dasar untuk lebih mengarahkan peningkatan komunikasi dari segala arah dalam memberikan kesadaran masyarakat untuk menerima perkembangan situasi dan kondisi yang sudah bergeser dari paradigma lama. Dalam rangka mensosialisasikan perkembangan situasi dan kondisi agar emosi masa menurun, maka dilakukan upaya melalui pemberdayaan media masa yang ada di Maluku, khususnya di Ambon. Media cetakpun terbagi menjadi 2, yaitu media komunitas Islam dan Kristen. Pengendalian dan

kontrol dari pemerintah tentang beberapa media sangat penting karena berita-berita yang ditayangkan dapat berdampak pada pembentukan opini masyarakat secara menyeluruh.

Kodam XVI/Pattimura, Dan Sektor I Ambon dan Danrem 151/Binaiya (Kol Inf Tony SB Hoesodo) sebaran Obrolan Mbah Sastro dan Obrolan Eyang Sastro. Dari tulisan-tulisan tersebut diharapkan memberikan informasi secara jelas apa yang sebenarnya terjadi sehingga semua pihak dapat mengendalikan diri masing-masing. Obrolan Mbah Sastro dan Eyang Sastro yang ditayangkan dalam siaran RRI Ambon oleh Tony SB Hoesodo dan Eva Munandar secara rutin setiap sabtu petang maupun yang diterbitkan secara tertulis disebarakan di kalangan aparat keamanan yang berada di tiap pos untuk memberikan informasi yang sebenarnya terjadi; paling tidak membatasi atau mengurangi keinginan dan perilaku yang menyimpang dari norma. Simbol kelompok yang bertikai memang sudah erat melekat dalam kehidupan masyarakat oleh karena itu perlu dicari jalan keluar agar simbol-simbol yang terbentuk tidak membakar semangat bertikai kedua belah pihak. Simbol yang terbentuk yaitu warna putih (konotasinya komunitas Islam/*Acang*) dan marna

merah (konotasinya komunitas Kristen / *Obet*).

Penolakan terhadap kehadiran satuan TNI sudah sejak hari pertama konflik Maluku yang disuarakan oleh massa. Hal yang sama pernah terjadi ketika satuan TNI harus mendarat di Makassar untuk menumpas gerakan Andi Azis. Gerakan Andi Azis diatur oleh jaksa Agung NIT, Dr. Soumokil (tadinya Menteri Kehakiman) dan Presiden NIT Tjokorde Gde sukawati (Marasabessy, 2002: 103-104).

Sebagian masyarakat menilai aparat keamanan TNI-Polri yang dikerahkan dalam menangani konflik kurang adil dalam melaksanakan tugasnya, karena terbentuk opini bahwa aparat keamanan tidak netral. Perpecahan anggota Polri menjadi Polisi Islam dan Polisi Kristen mempersulit tepisan bahwa aparat keamanan tidak terlibat konflik secara langsung maupun tidak langsung.

Kesepakatan Malino II yang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan konflik agama di Maluku boleh dikatakan sangat membantu dalam memfasilitasi perundingan antar kedua pihak yang bertikai apalagi dengan adanya komitmen dari kedua belah pihak, tetapi kelompok yang tidak ikut hadir dalam kesepakatan Malino II agak sulit menerima karena pengetahuan,

pengertian dan pemahaman isi kesepakatan sangat kurang, serta arogansi kelompok masih tinggi.

Pelaksanaan resolusi konflik telah dilaksanakan dengan berbagai macam pendekatan sehingga dapat mempercepat proses menurunnya eskalasi. Pendekatan yang dilaksanakan dihadapkan dengan perkembangan situasi dapat dilihat dari berbagai hasil yang dituangkan dalam tolok ukur yang jelas. Kemauan dan motivasi untuk saling menyerang semakin berkurang dengan semakin tumbuhnya kesadaran bahwa beban hidup selama konflik berlangsung dirasakan semakin berat dan perlu segera mendapatkan solusi yang tepat.

Peran masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara nyata diwujudkan dengan pendekatan budaya. Raja Paso melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan Raja Batumerah untuk saling memberikan contoh secara fisik dalam membangun kembali budaya Pela Gandong. Masjid yang rusak diperbaiki oleh masyarakat yang beragama Nasrani dan sebaliknya gereja yang rusak diperbaiki oleh masyarakat yang beragama Islam. Kegiatan ini membuahkan hasil yang signifikan, sehingga masjid yang berada di jalan raya Paso dapat difungsikan kembali oleh para pesinggah yang sedang dalam perjalanan dari Ambon ke Laha

untuk melaksanakan sholat pada saat waktu sholat tiba.

Kesimpulan

Pela Gandong merupakan suatu tradisi yang diwujudkan atas kesepakatan bersama antara masyarakat yang beragama Kristen dan Islam karena seringnya terjadi konflik pada masa-masa lalu. Penyebab awal konflik adalah kesenjangan kelas yang dieksplorir menjadi konflik agama. Proses terjadinya konflik mengikuti tahapan dengan cipta kondisi dan memperbesar hasil dengan eksploitasi. Para aktor yang terlibat konflik pada semua golongan saling memperjuangkan kepentingan masing-masing. Resolusi konflik telah dilaksanakan dengan berbagai pendekatan yang bersifat ekstern dan intern termasuk pelibatan masyarakat dan semua elemen yang terdapat dalam kelompok konflik.

Kelelahan konflik mewujudkan kesadaran masyarakat untuk memperbaiki keadaan, sehingga menghasilkan pikiran-pikiran jernih dalam memulihkan situasi dan kondisi yang telah terpuruk serta munculnya kemauan untuk membangun masyarakat dari dalam. Konflik agama di Pulau Ambon menjadi perhatian Pusat karena berkaitan dengan tuntutan kemampuan Pusat mengendalikan Daerah dan adanya tuntutan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2000. *Kondisi Sosial Yang Dibayangi Disintegrasi Tanpa Ujung*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2002. *Penggunaan dan Penyalahgunaan Kebudayaan dalam Pemecahan Konflik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2003. *Politik Bhinika Tunggal Ika dalam Keragaman Budaya Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2006. *Perkawinan Campur dan Mencairnya Teritori Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ajawaila, J.W.DR.DKK. 1999. *Proposal Pemecahan Masalah Kerusuhan di Ambon (Indonesia)*. Jakarta: Pokja Masalah Maluku.
- Ambo, Upe. 2008. *Sosiologi Politik Kontemporer*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Maluku. 2007. *Maluku Dalam Angka*. Ambon: BPS.
- Bartel, Dieter. 2000. *Tuhanmu Bukan Lagi Tuhanku*. Jakarta: Pokja Masalah Maluku.
- Buchori, Binny dkk. 2001. *Ketika Semerbak Cengkih Tergusur Asap Mesiu*. Jakarta: Sekretariat Tampak Ambon.
- Budi, Winarno. 2005. *Globalisasi wujud Imperialisme Gaya Baru*. Yogyakarta: Tajidu Press.
- Coser, Lewis A. 1967. *Continues in The Study of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Cresswell, John W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approach*. London: Sage Publications.
- Dahlan, Sukrawadi. 2007. *Pilkada, antara demokrasi lokal dan Konflik Sosial*. Jakarta: Pensil-324.
- Dahrendorf, Ralf. 1959. *Class and Class Conflict in Industrial Society Stanford*. Calib: Stanford University Press.
- Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat. 2005. *Sejarah TNI AD Tahun 1974- 2004*. Jakarta: Disbintalad.
- Fawaz A. Gerges. 2002. *Amerika dan Islam Politik Benturan Peradapan atau Benturan Kepentingan*. Jakarta: Penerbit Avia Bet.
- Gurr, Ted Robert. 1980. *Handbook of Political Conflict Theory and Research*, New York: The Free Press.
- Kementrian Negara PPN/ Bappenas. 2004. *RPJMN 2004-2009*. Jakarta: KN PPN/ Bappenas.
- . 2006. *Berjuang Membangun Kembali Indonesia, Laporan Kinerja Dua Tahun pemerintahan SBY-JK*. Jakarta: KN PPN/ Bappenas.

- . 2007. *Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008*. Jakarta: KN PPN/ Bappenas.
- Laode, M. Kamaludin. 2000. *Reorientasi Strategi dan Kebijakan Pembangunan Indonesia Serta Arah Pembangunan Daerah Dalam Format Indonesia Baru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lemhannas RI. 2006. *Pembangunan Sosial Budaya Dalam Kemajemukan Guna Harmonisasi Kehidupan Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Naskah Seminar.
- Mandagi, PC. 2002. *Maluku Baru, Dialog Antar Umat Beragama*. Jakarta: PT Abadi.
- Marasabessy, Abdul Rachman. 2002. *Fungsi dan Peran Agama dalam Pembangunan Masyarakat Maluku*. Jakarta: Pokja Masalah Maluku.
- Marasabessy, Suaidi. 2002. *Konflik Horizontal dan Vertikal di Poso dan Maluku*, Jakarta: Pokja Masalah Maluku.
- . 2002. *Postur Gubernur Maluku Terpilih Sebagai Faktor Kritis Dalam Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan di Maluku*, Jakarta: Tim Sukses.
- . 2002. *Tuntutan Perubahan Sosial didalam Masyarakat Maluku Pasca Konflik*. Jakarta: Pokja Masalah Maluku.
- Maryam, Lestaluhu. 1988. *Sejarah perlawanan Masyarakat Islam terhadap Imperialisme di Daerah Maluku*. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Masmiyat, Andi. 2005. *Perpolitian Masyarakat di Sulawesi Selatan*. Makassar: Pokja.
- . 2006. *Implementasi Kewaspadaan Nasional Terhadap Konflik Sara Dalam Kehidupan Masyarakat guna Meningkatkan Integrasi Nasional dalam rangka Pembangunan Sosial Budaya Bangsa Indonesia*. Jakarta: Lemhannas RI.
- . 2007. *Konflik Sara Integrasi Nasional Terancam Konsepsi dan Implementasi Tentang Kewaspadaan Nasional*. Jakarta: Pensil 324.
- Ralahalu, Karel, Albert. 2006. *Otonomi Daerah Di Tengah Konflik*. Jakarta: Pokja Masalah Maluku.
- Saelan, Maulwi, H. 2001. *Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66, Kesaksian Komandan Cakrabirawa*. Jakarta.
- Sammy Titaley. 2002. *Suatu Keanehan yang Nyata*. Jakarta.
- Sulistyo, Hermawan. 2005. *Pemolisan Masyarakat di Wilayah Konflik*. Jakarta: Pensil-324 dan Concern.
- Suryo, Djoko. 2005. *Nasionalisme dan Politik Identitas*. Yogyakarta: SOS.